

DAFTAR PUSTAKA

A. PENERBITAN PEMERINTAH

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. LN 2003. TLN No. 4316.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. LN 2011. TLN No. 5226.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. LN 2009. TLN No. 5076.

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

B. BUKU

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fatkhurohman, Aminudin, Dian dan Sirajuddin. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manan, Munafrizal. 2012. *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemantri, Sri. 1997. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fachrudin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun Buku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- MD, Moh. Mahfud. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

C. JURNAL

- Miftakhulhuda. 2007. *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor 3.

Chandranegara, Ibnu Sina. 2012. *Ultra Petita* dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 1.

D. INTERNET

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>

Asshidiqie, Jimly. “Tanya Jawab Kewenangan MK.” <http://www.jimly.com/tanyajawab?page=1140>

Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. “Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara.” http://pkhan.lan.go.id/index.php?option=com_joomdoc&task=document.download&path=2011%2FPengembangan+KUHAN%2FPengembangan+KUHAN+2011.pdf&Itemid=16 (2010).

Miftakhulhuda. “Erga Omnes.” <http://www.miftakhulhuda.com/2010/12/erga-omnes.html> (29 Desember 2010).

Darmayana, Hiski. “Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan Liberalisasi Sektor Kelistrikan.” <http://www.berdikarionline.com/opini/20120129/kenaikan-tarif-dasar-listrik-dan-liberalisasi-sektor-kelistrikan.html#ixzz2K22lwT4Q> (29 Januari 2012).

Ali. “UU MK Teranyar Larang *Ultra Petita*.” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4df77782a57eb/uu-mk-teranyar-larang-iultra-petitai> (14 juni 2011).